



ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA TK PANTI RINI

Hermina Sulastri¹, Andreas Rengga², Wihelmina Maryetha Yulia Jaeng³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat: Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: lastrimoko@gmail.com

Abstrack

This study examines the management of educational finances at TK Panti Rini with a focus on accountability and transparency. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing observation, interviews, and documentation techniques. The results show that the financial management system at TK Panti Rini has implemented proportional mechanisms of planning, control, accountability, and transparency. Although the financial reporting has not fully adopted non-profit accounting standards such as ISAK 35, periodic supervision by the Foundation enhances monitoring and evaluation of fund management effectiveness. These findings indicate that the institution has applied accountability principles consistent with good governance practices.

Keywords: *Finance, Education, Accountability, Transparency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan pendidikan pada TK Panti Rini, dengan indikator akuntabilitas dan transparansi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sistem pengelolaan keuangan di TK Panti Rini telah mencerminkan adanya mekanisme perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, dan transparansi yang berjalan secara proporsional. Meskipun belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi nonlaba seperti ISAK 35, Pengawasan berkala yang dilakukan oleh Yayasan memperkuat fungsi kontrol dan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan dana lembaga, sehingga mengindikasikan penerapan prinsip akuntabilitas yang

sesuai dengan standar tata kelola yang baik (*good governance*).

Kata Kunci: keuangan, Pendidikan, Akuntabilitas, Transparansi.

Pendahuluan

Lembaga pendidikan adalah organisasi yang bertujuan untuk mengawasi dan mengkoordinasikan berbagai aspek pendidikan intelektual, spiritual, dan keahlian, yang mencakup sosial, budaya, agama, penelitian, dan pengembangan keterampilan. Dunia pendidikan dianggap sebagai pusat utama yang menyediakan berbagai pembelajaran, bimbingan, dan pelatihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Sebuah pendidikan akan berhasil dengan baik manakala ditopang oleh tenaga pendidik yang profesional serta didukung oleh sarana dan prasarana belajar yang memadai. Pengelolaan TK yang baik ialah menjadi syarat utama untuk peningkatan lembaga pendidikan TK yang berkualitas, untuk mencapai pendidikan yang bermutu, sumber daya dalam suatu lembaga pendidikan, termasuk keuangan, harus dikelola secara komprehensif dan professional (Wati et al., 2024). Salah satu faktor utama yang menentukan keberlanjutan suatu lembaga adalah kondisi keuangan. Keuangan merupakan elemen yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan dan pengembangan lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang bagus, tentunya memiliki pengelolaan keuangan yang bagus pula guna mencapai target yang telah ditetapkan bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pengelolaan keuangan pendidikan harus memprioritaskan akuntabilitas dan transparansi untuk memastikan dana digunakan secara efektif. Tujuan adanya pengelolaan keuangan yakni, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah serta meminimalkan terjadinya penyalahgunaan anggaran sekolah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sejalan dengan itu, Yusuf (Wati et al., 2024) berpandangan, pengelolaan

TK yang baik ialah menjadi syarat utama untuk peningkatan lembaga pendidikan TK yang berkualitas. Menurut Murti & Kusumaningtia(Alfila et al., 2025) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaan dana pendidikan, karena tanpa akuntabilitas yang baik, anggaran tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengelolaan keuangan di TK Panti Rini meliputi perencanaan anggaran tahunan, pencatatan transaksi harian, serta pencatatan laporan keuangan periodik. Sebagai salah satu lembaga pendidikan anak usia dini TK Panti Rini tidak terlepas dari tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip akuntansi dalam penyajian laporan keuangan masih sederhana dan manual, kurangnya sistem dokumentasi yang tertata serta minimnya pihak luar dalam pengawasan keuangan.

Keterlibatan komite sekolah, dewan guru, dan orang tua siswa dalam proses penyusunan dan evaluasi anggaran mendorong dialog partisipatif yang memperkuat rasa kepemilikan terhadap program-program sekolah. Dalam studi yang dilakukan oleh Weni & Isfaiyah(Rusmiyati et al., 2025), sekolah yang melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan monitoring RKAM menunjukkan pengurangan signifikan terhadap konflik internal serta meningkatnya kepercayaan orang tua terhadap proses pendidikan anak-anak mereka. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya mengandalkan sistem pelaporan, tetapi juga memerlukan budaya pengawasan yang berkelanjutan dan sumber daya manusia yang kompeten. Akuntabilitas yang kuat menjadi jaminan bahwa setiap rupiah dana pendidikan digunakan secara bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan.

TK Panti Rini sebagai salah satu lembaga pendidikan taman kanak-kanak memiliki tanggung jawab dalam mengelolah dana yang bersumber dari iuran sekolah maupun bantuan dari pemerintah. Berdasarkan hasil observasi awal, pengelolaan keuangan di TK Panti Rini

masih sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparan. Hal ini terlihat dari penerapan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan belum menggunakan standar akuntansi keuangan yaitu ISAK 35, dan tidak adanya evaluasi berkala antara orang tua murid dengan komite menunjukkan lemahnya saluran komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan pendidikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah.

Tanpa adanya forum evaluatif yang terstruktur dan berkesinambungan, informasi mengenai perencanaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban keuangan sekolah tidak tersampaikan secara optimal kepada orang tua. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakterbukaan informasi mengenai penggunaan dana sekolah. Akibatnya, ruang interpretasi yang beragam dapat muncul dan berisiko memicu kesalahpahaman, ketidakpercayaan, serta persepsi negatif terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Oleh karena itu, evaluasi berkala yang melibatkan orang tua dan komite sekolah menjadi kebutuhan penting guna memastikan keterbukaan informasi, memperkuat partisipasi publik, serta mendukung tata kelola keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel.

Tinjauan Teori

Theory keagenan

Menurut Jensen dan Smith (1984) secara hubungan keagenan (*Agency Relationship*) merupakan kontrak di mana satu atau lebih *principal* yang memberikan kewenangan kepada agen otoritas untuk membuat keputusan. Disini yang dimaksud dengan *principal* adalah pegawai atau karyawan, sedangkan agen adalah seseorang yang memiliki kewenangan dalam instansi atau pemerintah. Konsep yang dikenal sebagai "perilaku teori keagenan" menggambarkan bagaimana hubungan antara *agent* dan *principal* (AzzaNurZubaidah; Nugraeni, 2023).

Dalam penulisan laporan magang ini, TK Panti Rini merupakan *principal* dan Yayasan merupakan *agent* sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan operasional koperasi. Teori ini di gunakan untuk menganalisis bagaimana sekolah (*agent*) bertanggung jawab kepada Yayasan (*principal*) atas penggunaan dana yang di berikan. Penerapan teori ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena sekolah di tuntutan untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas pengelolaan anggaran sekaligus menyediakan informasi keuangan secara terbuka kepada pemangku kepentingan.

Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Tanggung jawab keuangan merupakan proses pengelolaan uang dan fase yang dilakukan secara produktif (Heret *et al.*, 2022). Kementerian Pendidikan Nasional (2011) menjabarkan bahwa pengelolaan keuangan menjadi dasar dalam pengelolaan atau administrasi keuangan mulai dari mencatat, merencanakan, kemudian melaksanakan, mempertanggung jawabkan hingga melaporkan. Keuangan dan pembiayaan menjadi sumber dana yang bisa dikatakan dapat menjadi patokan keefektifan maupun efisiensi dalam mengelola pendidikan (Wati *et al.*, 2024). sekolah yang mampu mengelola keuangan dengan baik dapat memenuhi kebutuhan operasional, meminimalisir biaya administrasi, dan mengurangi biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Menurut Murti & Kusumaningtias (Alfila *et al.*, 2025) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaan dana pendidikan, karena tanpa akuntabilitas yang baik, anggaran tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Akuntabilitas

Menurut Salim (Setyanto *et al.*, 2022), akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban.

Akuntabilitas keuangan pendidikan adalah tanggung jawab lembaga pendidikan dalam mengelola, menggunakan, dan memepertanggung jawabkan dana yang di terima secara transparan, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan akuntabilitas yang baik, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi pengelolaan dan kualitas layanan publik.

Menurut Boy dan Siringoringo (Hamdan et al., 2020), indikator akuntabilitas meliputi:

1. Sekolah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam membuat laporan keuangan. Pemerintah mengeluarkan peraturan barutentang standar akuntansi pemerintahan, melalui PP Nomor 71 tahun 2010, yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, untuk menggantikan PP No 24 Tahun 2005.
2. Adanya pelaporan keuangan secara periodik.
3. Keterlibatan semua pihak dalam penyusunan RAPBS.

Jenis-jenis Akuntabilitas

Mahmudi (Salihi, Ignasius Ridwan Hutaeruk, 2023) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis diantaranya akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), merupakan pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Setiap petugas publik baik individu maupun kelompok secara bertahap akan memberikan pertanggung jawabannya kepada atasannya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara terstruktur maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

2. Akuntansi horizontal (*horizontal accountability*), adalah *horizontal* pertanggung jawaban kepada publik secara luas. Setiap lembaga negara baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memberikan pertanggungjawabannya atas semua amanat dilaksanakannya kepada masyarakat. yang diterima dan untuk memberikan pertanggungjawabannya atas semua amanat dilaksanakannya kepada masyarakat.

TK Panti Rini menerapkan bentuk akuntabilitas vertikal, yakni mekanisme pertanggungjawaban yang di arahkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan struktural lebih tinggi, dalam hal ini Yayasan sebagai badan penyelenggara. Akuntabilitas vertikal tersebut tercermin melalui penyampaian laporan keuangan, administrasi, serta pelaksanaan program secara periodik kepada yayasan sehingga keputusan operasional dan penggunaan sumber daya sekolah berada dalam pengawasan langsung pihak yang berwenang. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan lembaga berjalan sesuai ketentuan, standar operasional, serta kebijakan yayasan, sekaligus memperkuat transparansi dan kepercayaan antara satuan pendidikan dengan pemangku kepentingan utama

Transparansi

Transparansi juga merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai. Partisipasi aktif dari orang tua dan warga sekolah berkontribusi dalam mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah (Rusmiyati et al., 2025).

Ada beberapa indikator transparansi menurut Lazulfa (Gusrienti, 2025) yaitu:

1. Informatif

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat

adalah memberikan informasi secara jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan. adalah:

a. Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal yang material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalah pahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dan organisasi lain yang sejenisnya.

f. Mudah diakses

Informasi harus mudah diakses semua pihak.

2. Keterbukaan

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang.

3. Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial tentang informasi keuangan yang jelas dan transparan.

Metode

Metode analisa data yang di gunakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Risanaidah *et al.*, 2020) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara utuh fenomena mengenai analisis prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di TK Panti Rini. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bersifat menghasilkan teori di lapangan dan mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana keuangan pendidikan TK Panti Rini yang merupakan prinsip dengan tujuan dapat meningkatkan mutu TK Panti Rini. Rujukan penulis mengenai penulisan laporan ini adalah ketika TK Panti Rini melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi maka sekolah itu bersifat positif dan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan partisipasi masyarakat dan begitupun sebaliknya.

Penelitian kualitatif deskriptif analisis akan dapat memaparkan kejadian dalam sebuah situasi di lapangan. Penulisan laporan ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pendidikan di TK Panti Rini. Laporan ini berupaya mengkaji fenomena atau peristiwa suatu proses yang terkait dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pendidikan TK Panti Rini. Pendekatan dan jenis penelitian tersebut akan dapat mengetahui dan dapat menganalisis pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pendidikan di TK Panti Rini.

Hasil dan Pembahasan

1) Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Pendidikan di TK Panti Rini

Penerapan sistem pengelolaan keuangan di TK Panti Rini berlangsung secara terstruktur, transparan, dan berada di bawah pengawasan Yayasan St. Gabriel Maumere. Proses perencanaan anggaran dilakukan melalui koordinasi antara bendahara Yayasan dan bendahara setiap unit pendidikan untuk memastikan keseragaman pos-pos laporan keuangan. Penyusunan RABS dilakukan berdasarkan analisis realisasi anggaran tahun sebelumnya serta kebutuhan aktual setiap kelas, kemudian ditinjau dan disetujui oleh kepala sekolah sebelum diajukan kepada Yayasan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan, RABS menjadi pedoman resmi bagi unit pendidikan dalam merealisasikan anggaran. Dengan demikian, sistem pengelolaan keuangan di TK Panti Rini menunjukkan adanya mekanisme perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan yang jelas dan akuntabel.

2) Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Akuntabilitas

Tingkat akuntabilitas di TK Panti Rini dapat dikategorikan baik berdasarkan mekanisme pelaporan dan tata kelola yang telah diterapkan. Pelaporan keuangan yang dilakukan secara rutin setiap bulan menunjukkan adanya komitmen lembaga dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada pihak Yayasan. Selain itu, pengguna bahwa proses pencatatan dan pelaporan berlangsung secara sistematis, transparan, serta sesuai dengan standar yang berlaku.

Melalui pengawasan berkala dari Yayasan, laporan keuangan tersebut menjadi instrumen evaluasi yang efektif terhadap kinerja pengelolaan dana di TK Panti Rini. Hal ini memperlihatkan bahwa lembaga telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Transparansi

Sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan diterapkan dengan prinsip pembatasan akses demi menjaga keamanan dan akurasi informasi. Model pengelolaan keuangan di TK Panti Rini menerapkan kombinasi antara kerahasiaan internal dan transparansi selektif berdasarkan asal-usul dana, sehingga dapat menciptakan tata kelola yang seimbang, profesional, dan sesuai standar akuntabilitas lembaga pendidikan. Secara umum, seluruh data keuangan hanya dapat diakses oleh pihak internal yang memiliki otoritas, seperti pengelola lembaga dan staf administrasi yang berwenang. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kerahasiaan data, mencegah potensi penyalahgunaan informasi, serta memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan berlangsung secara tertib dan akuntabel.

Namun demikian, terdapat pengecualian untuk dana yang bersumber dari pemerintah. Informasi mengenai pengelolaan dan pelaporan dana tersebut dapat diakses oleh pihak eksternal sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan keuangan lembaga telah dilaksanakan secara terstruktur dan berada dalam pengawasan langsung Yayasan St. Gabriel Maumere. Proses penyusunan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS) dilakukan melalui mekanisme koordinasi antara bendahara Yayasan dan bendahara unit pendidikan guna mencapai keseragaman struktur pos keuangan antar lembaga. Meskipun penyusunan anggaran masih mengandalkan pendekatan historis dan belum sepenuhnya berpedoman pada standar akuntansi entitas nonlaba seperti ISAK 35, tahapan perencanaan, verifikasi, dan persetujuan anggaran telah menunjukkan adanya pola pengelolaan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dari aspek akuntabilitas, TK Panti Rini telah menerapkan praktik yang memadai melalui pelaporan keuangan rutin setiap bulan kepada yayasan sebagai bentuk pertanggungjawaban formal. Pemanfaatan pedoman pelaporan yang ditetapkan oleh yayasan turut menjamin konsistensi, ketelitian, serta keteraturan dalam penyajian laporan keuangan. Pengawasan berkala yang dilakukan oleh Yayasan memperkuat fungsi kontrol dan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan dana lembaga, sehingga mengindikasikan penerapan prinsip akuntabilitas yang sesuai dengan standar tata kelola yang baik (good governance). Pengembangan usaha dari pihak pemerintah desa sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berjalan dengan maksimal sehingga dibatalkan.
3. Tingkat transparansi yang diterapkan bersifat terbatas dan selektif. Akses terhadap informasi keuangan dibatasi hanya kepada pihak internal yang berwenang, seperti kepala sekolah dan bendahara, dengan tujuan menjaga keamanan dan kerahasiaan data keuangan lembaga. Namun, untuk dana yang berasal dari pemerintah, lembaga menerapkan keterbukaan sesuai ketentuan regulatif sehingga dapat diakses oleh pihak eksternal sebagai bentuk pemenuhan prinsip transparansi publik. Dengan demikian, praktik transparansi yang diterapkan menggabungkan aspek kerahasiaan internal dan keterbukaan yang disesuaikan dengan sumber dana.

Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas penulis dapat merekomendasikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi TK Panti Rini, perlu dilakukan penguatan dan optimalisasi kembali peran komite sekolah sebagai unsur pengawas internal yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung tata kelola kelembagaan.
2. Bagi penulis selanjutnya, Peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian, misalnya dengan melibatkan lebih banyak lembaga pendidikan atau unit sekolah,

sehingga hasil penelitian memiliki cakupan dan generalisasi yang lebih kuat. Dan dapat menambahkan variabel lain yang relevan, seperti efektivitas pengawasan yayasan, kompetensi bendahara, atau tingkat pemanfaatan teknologi keuangan di lembaga Pendidikan.

Daftar Pustaka

- Alfila, T., Jaeng, W. M., & Lamawitak, P. L. (2025). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 1 Nita. *Jurnal Projemen UNIPA*.
- Azza Nur Zubaidah; Nugraeni. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. 978–988.
- D Sabrudin, E. S. (2019). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Profesionalisme Paedagogik Terhadap Kinerja Guru Di SMKN 21 JAKARTA.
- Gusrienti, N. (2025). Konsep transparansi dan komunikasi yang efektif dalam pencairan dana bantuan sosial ummat. 2(2), 180–191.
- Hamdan, M. N., Ruslan, F., Husain, R. F., Aditiya, R., Akuntansi, J., Islam, U., & Alauddin, N. (2020). Pemerintah Berdasarkan Prinsip Islam (Studi: Satuan Kerja Perangkat Daerah). 1, 147–160.
- Heret, N. P., Dince, M. N., & Romario, F. De. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Ibu Rumah Tangga Desa Rubit Kecamatan Hewoloang. 1, 152–164.
- Ja, A., Rengga, A., & Luju, E. (2023). Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Anggaran Pada Kantor Camat Waigete. 10(3), 50–63.
- Lotak, A., Dince, M. N., & Jaeng, W. M. Y. (2024). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa:(Studi Kasus Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka). *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 543-571.
- Maimanah, A. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung). 3(2).
- Manajemen, A., Di, K., Wati, S., Alintang, D. P., Amelia, R., Maharani, B. H., Roviqoh, F. A., Hilmi, M. I., & Atika, A. N. (2024). TK BINA ANAPRASA NURIS JEMBER yang diselenggarakan berupa program ialah Pendidikan Anak Usia Dini mengamankan sumber pendanaan untuk pendidikan dan keuangan dikelola untuk. 7(1).
- Maslufi, L. Z., Maryam, A., & Seno, M. F. (2025). Pengaruh Transparansi Dan Tanggung

Jawab Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Sekolah. Pengaruh Transparansi Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas.

- Maslufi, L. Z., Maryam, A., Seno, M. F., Bina, U., Informatika, S., Ihsan, A., Jawab, T., & Sekolah, P. K. (2025). Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya ANGGARAN SEKOLAH Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Latar Belakang Rumusan Masalah Tinjauan Pustaka. 10(2). <https://doi.org/10.35968/jbau>
- Masruri, M., Ali, H., Rosadi, K. I., Islam, U., Sultan, N., Jambi, T. S., Islam, U., Sultan, N., Saifuddin, T., Islam, U., Sultan, N., & Saifuddin, T. (2021). Pengelolaan Keuangan Dalam Mempertahankan Kualitas Pondok Pesantren Selama Pandemi Covid-19. 2(5), 644–657.
- Nean, M. F., Rengga, A., & Jaeng, W. M. Y. (2025). Analisis Pengawasan Tata Kelola Koperasi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Ksp Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante. *Jurnal Projemen UNIPA*, 12(3), 372-381.
- Norsiva, S. (2024). Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Pendidikan Yang Transparan Dan Akuntabel di Indonesia. 3(2), 153–162.
- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., Vabiani, D. P., Pascasarjana, S., & Widyatama, U. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. 10(1), 51–61.
- Nurul Afifah, F. F. (2021). Analisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi isak 35 pada yayasan an-nahl bintang. 3(2), 24–34.
- Radha, O., Rengga, A., Fransesco, T., Patty, Q., & Da, E. Y. (2025). Analisis tata kelola BUMDes Sahabat meningkatkan pendapatan asli Desa Solo Kita dalam. 5(3), 751–764.
- Rusmiyati, L., Abdullah, R., Zulaikha, S., & Takdir, M. (2025a). Transformasi Manajemen Keuangan Sekolah di Era Digital: Kajian Literatur terhadap Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas. 3(4), 5372–5380.
- Rusmiyati, L., Abdullah, R., Zulaikha, S., & Takdir, M. (2025b). Transformasi Manajemen Keuangan Sekolah di Era Digital: Kajian Literatur terhadap Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di Indonesia.
- Rusti Wulaningsih, N. A. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. 4, 1723–1732.
- Salihi, Ignasius Ridwan Hutaeruk, H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. 2(6), 769–778.
- Salihi, S., & Hutaeruk, I. R. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap

- Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(6), 769–778.
- Sari, N. S., Lisa, P., & Gultom, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Sekolah terhadap Kinerja Guru. 6, 7518–7521.
- Selianawati, F., Ulfah, I. F., & Wijayanti, I. (2025). Pemahaman Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten. *Jurnal Ilmu Ekonom*.
- Setiawan, B., & Shaleh, S. (2023). Akuntabilitas sebagai prinsip pengelolaan.
- Setyanto, R., Ridloah, S., & Suryasari, A. (n.d.). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. *JMM UNRAM-Master of Management Journal*, 11(3), 228–238.
- Setyanto, R., Ridloah, S., Suryasari, A., Ekonomi, F., & Negeri, U. (2022). Universitas Negeri Semarang Jurnal Magister Manajemen Unram. 11(3), 228–238. <https://doi.org/10.29303/jmm.v11i3.737>
- Sola, S., Dekrita, Y. A., & Jaeng, W. M. Y. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Entitas Nonlaba Pada Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Tilang. *Jurnal Projemen UNIPA*, 12(3), 674-684.
- Ulfa, M. (2020). Jurnal Pendidikan Anak, Volume 9 (1), 2020, 27-32 Akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan dalam mensejahterakan guru dan anak didik di TK Alfadlillah Maguwoharjo Yogyakarta. 9(1), 27–32.
- Wati, S., Alintang, D. P., Amelia, R., Maharani, B. H., & Roviqoh, F. A. (2024). Analisis Manajemen Keuangan Di Lembaga Tk Bina Anaprasi Nuris Jember.
- Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan keuangan pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723–1732.